

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau justru mengalami kegagalan dalam praktiknya. Rantung (2024) menegaskan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses kompleks yang melibatkan transformasi kebijakan dari konsep abstrak menjadi tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kompleksitas ini tidak hanya terletak pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga pada dinamika interaksi antar berbagai aktor, institusi, dan faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan

Menurut Alim (2024), implementasi kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kebijakan yang telah diformulasikan ke dalam tindakan konkret yang berdampak pada masyarakat. Proses implementasi tidak dapat dipandang sebagai aktivitas yang sederhana dan linier, melainkan melibatkan interpretasi kebijakan, mobilisasi sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan adaptasi terhadap kondisi lokal yang seringkali berbeda dengan asumsi yang mendasari desain kebijakan awal. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan menjadi arena di mana kebijakan bertemu dengan realitas praktis yang penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas.

Fauzan (2024) mengembangkan perspektif lebih lanjut dengan menekankan bahwa model implementasi kebijakan publik harus mempertimbangkan multiple faktor yang saling berinteraksi, termasuk karakteristik kebijakan itu sendiri, kapasitas institusi pelaksana, dukungan politik, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Perspektif ini mengakui bahwa implementasi bukanlah proses mekanis yang mengikuti blueprint kebijakan secara kaku, melainkan proses adaptif yang membutuhkan penyesuaian berkelanjutan terhadap kondisi yang berubah dan tantangan yang muncul selama proses implementasi berlangsung.

Dalam konteks pendidikan kebijakan, Dwi *et all* (2024) menganalisis implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik, mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kualitas komunikasi kebijakan dan pemahaman yang konsisten di antara semua stakeholder yang terlibat. Temuan ini menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan adalah memastikan bahwa maksud dan tujuan kebijakan dipahami secara seragam oleh semua pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, mulai dari level pemerintah pusat hingga implementor di tingkat lapangan.

Menurut Sapuan dan Aras (2024) melalui analisis implementasi kebijakan publik program percepatan infrastruktur kelurahan mendemonstrasikan bahwa implementasi kebijakan di tingkat lokal menghadapi tantangan unik yang berkaitan dengan kapasitas teknis, keterbatasan sumber daya, dan dinamika politik lokal. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa pemerintah daerah seringkali harus melakukan penyesuaian dan inovasi dalam implementasi untuk mengakomodasi

kondisi lokal yang spesifik, sambil tetap mempertahankan esensi dan tujuan utama dari kebijakan yang diimplementasikan.

Urgensi implementasi kebijakan publik semakin meningkat dalam era *governance* yang menekankan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Wahyudi (2024) menegaskan bahwa implementasi yang efektif membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai stakeholder dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Kolaborasi ini tidak hanya penting untuk memastikan dukungan terhadap kebijakan, tetapi juga untuk memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang tersebar di berbagai sektor untuk mencapai hasil implementasi yang optimal.

Nurmayasari (2024) mengembangkan perspektif tentang implementasi pembelajaran berbasis masalah yang relevan dengan implementasi kebijakan, di mana pendekatan problem-solving menjadi kunci dalam mengatasi tantangan implementasi. Perspektif ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang berhasil membutuhkan kapasitas untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, dan mengembangkan solusi yang tepat sasaran dalam konteks sumber daya dan kapasitas yang tersedia.

Arrohmati dan Pertiwi (2024) melalui analisis implementasi program Kas-RPA Kampung Asuh dalam mewujudkan Surabaya Kota Layak Anak memberikan contoh konkret tentang bagaimana implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang kompleks melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Studi mereka mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan yang berhasil membutuhkan tidak hanya sumber daya yang memadai, tetapi juga komitmen

jangka panjang dan mekanisme monitoring yang sistematis untuk memastikan keberlanjutan program.

Dalam konteks digitalisasi menganalisis keberhasilan implementasi digitalisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia, menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi enabler yang powerful untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Namun, adopsi teknologi dalam implementasi kebijakan juga membutuhkan perhatian khusus terhadap aspek capacity building dan change management untuk memastikan bahwa inovasi teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua stakeholder yang terlibat (Ningsih *et al*, 2024).

Taali *et al*. (2024) menyediakan perspektif teoritis dan model evaluasi kebijakan yang menekankan pentingnya framework sistematis untuk menilai keberhasilan implementasi. Pendekatan mereka mengintegrasikan multiple perspektif evaluasi untuk memberikan penilaian yang komprehensif tentang berbagai dimensi keberhasilan implementasi, mulai dari efisiensi proses hingga dampak substantif yang dihasilkan oleh kebijakan (Taali *et al*, 2024).

Kholifah *et al* (2024) mengeksplorasi model perumusan kebijakan pendidikan yang memberikan insights tentang bagaimana kualitas desain kebijakan mempengaruhi kemudahan implementasi. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor implementasi sejak awal akan memiliki probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebijakan yang dirancang tanpa pertimbangan yang memadai terhadap realitas implementasi.

Fajj'rina dan Wibawani (2024) melalui studi implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban memberikan contoh tentang bagaimana kebijakan yang relatif sederhana dapat menghadapi tantangan implementasi yang kompleks ketika berinteraksi dengan kondisi lokal yang spesifik. Studi mereka mendemonstrasikan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal dalam merancang strategi implementasi yang efektif.

Kesimpulannya, implementasi kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dan multidimensional yang menentukan apakah tujuan kebijakan dapat dicapai dalam praktik. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kualitas desain kebijakan, tetapi juga pada kapasitas institusi pelaksana, dukungan stakeholder, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal yang dinamis. Pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi menjadi kunci untuk mengembangkan strategi implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

2.2 Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan telah berkembang seiring dengan evolusi pemahaman tentang kompleksitas proses implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Fauzan (2024) mengidentifikasi bahwa model implementasi kebijakan publik perlu mempertimbangkan interaksi dinamis antara berbagai variabel yang mempengaruhi proses transformasi kebijakan dari konsep menjadi tindakan nyata. Dalam konteks ini, pemilihan model implementasi yang

tepat menjadi krusial untuk memandu analisis dan evaluasi implementasi kebijakan secara sistematis dan komprehensif.

Salah satu model implementasi yang paling berpengaruh dan relevan untuk analisis implementasi kebijakan di tingkat daerah adalah Model Van Meter dan Van Horn (1975). Model ini dikembangkan berdasarkan premis bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh multiple variabel yang saling berinteraksi. Van Meter dan Van Horn menyediakan kerangka analitis yang sistematis untuk memahami mengapa beberapa kebijakan berhasil diimplementasikan dengan efektif sementara yang lain mengalami kegagalan atau pencapaian yang suboptimal.

Standar dan Tujuan Kebijakan merupakan variabel pertama dalam model Van Meter dan Van Horn yang mengacu pada kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan yang ditetapkan. Alim (2024) menegaskan bahwa standar dan tujuan kebijakan yang jelas dan terukur memberikan panduan yang konkret bagi implementor dalam menjalankan aktivitas implementasi. Kejelasan tujuan ini tidak hanya penting untuk memastikan bahwa semua stakeholder memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang ingin dicapai, tetapi juga untuk memfasilitasi monitoring dan evaluasi implementasi. Dalam konteks kebijakan daerah, standar dan tujuan yang spesifik dan kontekstual menjadi sangat penting mengingat variasi kondisi lokal yang dapat mempengaruhi interpretasi dan pelaksanaan kebijakan.

Sumber Daya merupakan variabel kedua yang mencakup sumber daya finansial, manusia, teknis, dan waktu yang tersedia untuk implementasi kebijakan. Rantung (2024) mengidentifikasi bahwa keterbatasan sumber daya seringkali

menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan, khususnya di tingkat pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan teknis yang terbatas. Kecukupan sumber daya tidak hanya berkaitan dengan kuantitas, tetapi juga kualitas dan distribusi sumber daya yang tepat untuk mendukung berbagai aktivitas implementasi. Mobilisasi sumber daya yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antar berbagai sumber untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Karakteristik Badan Pelaksana mengacu pada struktur organisasi, kapasitas, dan karakteristik institusi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan. Dwi *et al.* (2024) menekankan bahwa kapabilitas organisasi, termasuk sistem manajemen, budaya organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia, secara signifikan mempengaruhi kualitas implementasi. Karakteristik ini mencakup tidak hanya aspek struktural seperti hirarki dan pembagian tugas, tetapi juga aspek kultural seperti komitmen terhadap tujuan kebijakan dan norma-norma yang memandu perilaku organisasi. Dalam konteks implementasi kebijakan daerah, karakteristik badan pelaksana yang adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal menjadi sangat penting untuk keberhasilan implementasi.

Komunikasi Antarorganisasi merupakan variabel yang mengacu pada kualitas koordinasi dan pertukaran informasi antar berbagai organisasi yang terlibat dalam implementasi. Sapuan dan Aras (2024) mengidentifikasi bahwa komunikasi yang efektif antar lembaga menjadi kunci untuk menghindari duplikasi, konflik, dan kesalahpahaman dalam proses implementasi. Komunikasi yang baik tidak hanya melibatkan transfer informasi, tetapi juga pembangunan pemahaman

bersama tentang tujuan, strategi, dan peran masing-masing organisasi dalam proses implementasi. Dalam konteks multi-level governance, komunikasi vertikal dan horizontal yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan koherensi implementasi di berbagai tingkat pemerintahan.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik mengacu pada lingkungan eksternal yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Wahyudi (2024) menegaskan bahwa kondisi kontekstual ini dapat menjadi faktor pendukung atau penghambat implementasi, tergantung pada bagaimana kebijakan berinteraksi dengan realitas sosial yang ada. Kondisi sosial mencakup nilai-nilai, norma, dan ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan. Kondisi ekonomi meliputi tingkat kesejahteraan, struktur ekonomi lokal, dan ketersediaan sumber daya ekonomi. Kondisi politik mencakup dukungan politik, stabilitas pemerintahan, dan dinamika kekuasaan yang dapat mempengaruhi prioritas dan komitmen terhadap implementasi kebijakan.

Disposisi Pelaksana mengacu pada sikap, persepsi, dan komitmen dari para implementor terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Nurmayasari *et al.* (2024) mengidentifikasi bahwa disposisi positif dari implementor, termasuk pemahaman yang baik tentang kebijakan dan komitmen untuk mencapai tujuan, secara signifikan meningkatkan probabilitas keberhasilan implementasi. Disposisi pelaksana dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk tingkat pemahaman terhadap kebijakan, persepsi tentang manfaat kebijakan, dan insentif yang tersedia untuk mendorong implementasi yang efektif. Dalam konteks implementasi kebijakan daerah, disposisi pelaksana yang positif dapat dikembangkan melalui sosialisasi yang efektif, capacity building, dan sistem reward yang memadai.

Model Van Meter dan Van Horn memberikan keunggulan dalam hal komprehensivitas dan kemampuannya untuk menganalisis interaksi kompleks antar berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi. Arrohmati dan Pertiwi (2024) mendemonstrasikan aplikasi model ini dalam konteks program pemerintah daerah, menunjukkan bahwa model ini dapat memberikan insights yang valuable tentang faktor-faktor kritis yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi.

Taali *et al.* (2024) memperkuat argumen tentang relevansi model Van Meter dan Van Horn dengan menyediakan perspektif evaluasi yang sistematis. Model ini tidak hanya berguna untuk analisis implementasi, tetapi juga untuk merancang strategi peningkatan implementasi berdasarkan identifikasi kelemahan pada masing-masing variabel. Pendekatan diagnostik ini memungkinkan pengembangan intervensi yang tepat sasaran untuk mengatasi hambatan implementasi yang spesifik.

Kholifah *et al.* (2024) mengidentifikasi bahwa model implementasi yang baik harus mampu menjelaskan tidak hanya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, tetapi juga dinamika interaksi antar faktor tersebut. Model Van Meter dan Van Horn memberikan kerangka yang fleksibel untuk memahami interaksi ini, sambil tetap menyediakan struktur analitis yang jelas untuk mengorganisir data dan temuan penelitian implementasi.

Dalam konteks implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah, model Van Meter dan Van Horn menyediakan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis berbagai aspek implementasi mulai dari kejelasan regulasi,

kecukupan sumber daya, kapasitas institusi pelaksana, koordinasi antar lembaga, kondisi lokal yang mendukung atau menghambat, hingga komitmen implementor. Model ini memungkinkan analisis yang holistik tentang mengapa implementasi berhasil atau menghadapi tantangan dalam konteks spesifik Kabupaten Ciamis.

Kesimpulannya, Model Van Meter dan Van Horn menyediakan framework yang robust dan komprehensif untuk menganalisis implementasi kebijakan dengan mempertimbangkan multiple variabel yang saling berinteraksi. Model ini tidak hanya berguna untuk keperluan analisis akademis, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk meningkatkan efektivitas implementasi melalui perhatian yang sistematis terhadap setiap variabel dan interaksi antar variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

2.3 Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah

Konstruksi konseptual kebijakan ideal merepresentasikan sintesis dari berbagai perspektif teoretis dan bukti empiris tentang karakteristik yang mendefinisikan kebijakan publik yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Konsep ini, sebagai kelanjutan dari pembahasan relevansi teori kebijakan terhadap konteks lokal, tidak merujuk pada konstruk teoretis abstrak, melainkan pada kerangka yang dapat ditindaklanjuti untuk memandu desain dan evaluasi kebijakan dalam konteks dunia nyata, khususnya dalam domain kebijakan lingkungan di tingkat daerah.

Dalam konteks kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, Grabs *et al.* (2021) menyediakan wawasan fundamental tentang mendesain kebijakan zero-

deforestation supply chain yang efektif dan berkeadilan. Penelitian mereka mengidentifikasi bahwa desain kebijakan yang efektif membutuhkan perhatian yang cermat terhadap dampak distribusional dan kelayakan implementasi. Temuan ini mengungkapkan bahwa kebijakan ideal dalam konteks lingkungan bukan hanya yang mencapai tujuan ekologis, tetapi juga yang memastikan perlakuan yang adil terhadap berbagai stakeholders dan meminimalkan gangguan ekonomi yang tidak diinginkan bagi masyarakat lokal.

Memperkuat perspektif tentang kualitas input kebijakan, Ackrill dan Galanakis (2023) menekankan pentingnya kualitas input dalam menentukan dampak kebijakan. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa efektivitas kebijakan secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas bukti, proses konsultasi stakeholder, dan rigor analitis yang mendasari pengembangan kebijakan. Dalam kerangka ini, kebijakan ideal adalah yang dibangun atas dasar bukti yang kuat, keterlibatan stakeholder yang komprehensif, dan analisis yang mendalam tentang konteks implementasi.

Berdasarkan sintesis literatur tersebut, prinsip-prinsip fundamental yang mengkarakterisasi kebijakan ideal dapat diorganisasikan ke dalam beberapa dimensi inti yang saling terkait:

- **Fondasi Berbasis Bukti:** Berdasarkan pada penelitian komprehensif, analisis data, dan bukti empiris tentang definisi masalah, mekanisme kausal, dan solusi potensial yang telah teruji dalam konteks serupa.

- **Inklusivitas Stakeholder:** Mengincorporasikan perspektif dan kepentingan dari semua stakeholders yang relevan, khususnya mereka yang berpotensi terdampak oleh implementasi kebijakan, melalui proses konsultasi yang bermakna.
- **Kelayakan Implementasi:** Dirancang dengan penilaian realistis tentang kapasitas administratif, sumber daya finansial, dan batasan politik yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam konteks lokal.
- **Kapasitas Adaptif:** Mengincorporasikan mekanisme untuk monitoring, evaluasi, dan penyesuaian berdasarkan pengalaman implementasi dan perubahan keadaan yang tidak terduga.
- **Pertimbangan Kesenjangan:** Menangani dampak distribusional dan memastikan bahwa kebijakan tidak secara tidak proporsional membebani populasi rentan atau memperburuk ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat.
- **Orientasi Berkelanjutan:** Mempertimbangkan implikasi jangka panjang dan dampak lingkungan untuk memastikan kebijakan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

Dalam domain konservasi biodiversitas, Cashore *et al.* (2024) mengeksplorasi desain kebijakan untuk konservasi yang mengungkapkan bahwa desain kebijakan yang *fit-for-purpose* membutuhkan pemahaman mendalam tentang karakteristik masalah dan faktor kontekstual. Penelitian mereka tentang kebijakan konservasi lahan gambut mendemonstrasikan bahwa kegagalan kebijakan seringkali dihasilkan dari ketidakselarasan antara instrumen kebijakan dengan karakteristik masalah spesifik, menyoroti pentingnya pendekatan diagnostik dalam desain kebijakan yang tepat sasaran.

Kesimpulannya, konseptual kebijakan ideal menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk menilai dan meningkatkan kualitas kebijakan publik secara sistematis. Kebijakan ideal tidak hanya mencapai tujuan substantif yang telah ditetapkan, tetapi juga memenuhi standar proses yang tinggi dalam hal inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas demokratis. Dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah di daerah, prinsip-prinsip kebijakan ideal ini memberikan kriteria yang jelas untuk mengevaluasi sejauh mana desain dan implementasi kebijakan memenuhi standar best practices dalam tata kelola publik, sekaligus memberikan panduan untuk perbaikan berkelanjutan dalam implementasi kebijakan lingkungan di tingkat lokal.

2.4 Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan konteks yang komprehensif terhadap penelitian ini, berikut disajikan analisis komparatif terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah:

Tabael 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis / Judul / Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan (Persamaan & Perbedaan)
1	Madhavaraj, M. (2025) <i>"A review of municipal solid waste management and landfills in India: environmental impacts, sustainable</i>	Literature Review	Mengidentifikasi dampak lingkungan pengelolaan sampah municipal dan merumuskan strategi berkelanjutan serta insights kebijakan	Persamaan: Fokus pada kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal. Perbedaan: Penelitian ini menggunakan pendekatan review literatur, sedangkan penelitian kami fokus pada

No	Nama Penulis / Judul / Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan (Persamaan & Perbedaan)
	<i>strategies and policy insights"</i>			implementasi perda spesifik di Ciamis
2	Amuda, I. (2025) <i>"Visiting the Institutional Landscape: Building better Waste Management through multilevel regulatory harmonization, a case from Malang Regency"</i>	Studi Kasus	Menganalisis harmonisasi regulasi multi-level dalam pengelolaan sampah dan mengidentifikasi faktor-faktor institusional yang mempengaruhi efektivitas	Persamaan: Studi kasus implementasi kebijakan sampah di tingkat kabupaten di Indonesia. Perbedaan: Fokus pada harmonisasi multi-level, sedangkan penelitian kami fokus pada implementasi single-level di Ciamis
3	Ekowanti, M.R.L. (2025) <i>"Challenges and Policy Framework of Hazardous and Poisonous Waste Management in Indonesia: Policy Implementation and Public Impact"</i>	Mixed Methods	Mengidentifikasi tantangan implementasi kebijakan sampah B3 dan dampaknya terhadap publik, serta mengembangkan framework implementasi	Persamaan: Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. Perbedaan: Fokus pada sampah B3, sedangkan penelitian kami pada sampah municipal di Ciamis
4	Colivicchi, I. (2025) <i>"Performance indicators for measuring municipal and national targets: a comprehensive analysis in Waste Management"</i>	Kuantitatif	Mengembangkan indikator kinerja komprehensif untuk mengukur target municipal dalam pengelolaan sampah	Persamaan: Mengembangkan indikator pengukuran kinerja pengelolaan sampah. Perbedaan: Fokus metodologi pengembangan indikator, sedangkan kami mengaplikasikan

No	Nama Penulis / Judul / Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan (Persamaan & Perbedaan)
				indikator untuk menilai implementasi
5	Khan, A.A. (2025) <i>"Revolutionizing clinic waste management: government intervention, clinic registration, investment strategies using predictive machine learning models"</i>	Kuantitatif (Machine Learning)	Menganalisis peran intervensi pemerintah dalam pengelolaan sampah klinik dengan pendekatan machine learning	Persamaan: Menganalisis peran intervensi pemerintah dalam pengelolaan sampah. Perbedaan: Fokus pada sampah medis dengan pendekatan teknologi, sedangkan kami fokus pada implementasi regulasi tradisional
6	Atofarati, E.O. (2025) <i>"Sustainable smart waste management solutions for rapidly urbanizing African Cities"</i>	Mixed Methods	Mengidentifikasi solusi pengelolaan sampah berkelanjutan untuk kota-kota berkembang pesat di Afrika	Persamaan: Mengkaji solusi pengelolaan sampah berkelanjutan di daerah berkembang. Perbedaan: Konteks geografis Afrika vs Indonesia, fokus smart solutions vs implementasi regulasi
7	Alhowaish, A.K. (2025) <i>"Unlocking the Potential of the Circular Economy at Municipal Levels: A Study of Expert Perceptions in the Dammam"</i>	Kualitatif (Expert Survey)	Menganalisis persepsi ahli terhadap implementasi ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah di tingkat municipal	Persamaan: Mengkaji implementasi konsep pengelolaan sampah di tingkat municipal. Perbedaan: Fokus pada ekonomi sirkular vs implementasi perda, menggunakan

No	Nama Penulis / Judul / Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan (Persamaan & Perbedaan)
	<i>Metropolitan Area"</i>			expert perception vs analisis implementasi lapangan
8	Armillei, R. (2025) <i>"Embedding a Circular Economy through Local Government in Gippsland: A Case Study, Utilising Smart Specialisation Methodology"</i>	Studi Kasus	Menganalisis peran pemerintah lokal dalam implementasi ekonomi sirkular menggunakan metodologi smart specialisation	Persamaan: Studi kasus peran pemerintah lokal dalam implementasi kebijakan lingkungan. Perbedaan: Konteks Australia vs Indonesia, fokus ekonomi sirkular vs pengelolaan sampah komprehensif
9	Bolivar, V. (2025) <i>"Advancing circularity in a Chilean neighborhood through the water-waste-energy nexus: A stakeholder analysis"</i>	Kualitatif (Stakeholder Analysis)	Menganalisis pendekatan stakeholder dalam implementasi pengelolaan sampah terintegrasi dengan air dan energi	Persamaan: Menggunakan pendekatan analisis stakeholder dalam pengelolaan sampah. Perbedaan: Konteks Chile vs Indonesia, fokus nexus approach vs implementasi perda tunggal
10	Wirtu, Y.D. (2025) "A review of public perception and awareness of e-waste management in developing countries: challenges and opportunities for sustainable solutions"	Systematic Review	Menganalisis persepsi dan kesadaran publik terhadap pengelolaan e-waste di negara berkembang	Persamaan: Mengkaji persepsi publik dalam pengelolaan sampah di negara berkembang. Perbedaan: Fokus pada e-waste vs sampah municipal, systematic review vs studi implementasi

No	Nama Penulis / Judul / Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan (Persamaan & Perbedaan)
11	Salgin, B. (2025) "Awareness, perceived importance, and implementation of circular economy principles: Insights from Turkish construction sector"	Survey	Menganalisis kesadaran, persepsi pentingnya, dan implementasi prinsip ekonomi sirkular di sektor konstruksi	Persamaan: Mengkaji implementasi prinsip pengelolaan sampah/lingkungan . Perbedaan: Sektor konstruksi vs pemerintah daerah, ekonomi sirkular vs implementasi perda
12	Rayhan, M.G.S. (2025) "Identification and prioritization of barriers to smart waste management systems in the textile and apparel (T&A) industry"	Mixed Methods	Mengidentifikasi dan memprioritaskan hambatan dalam implementasi sistem pengelolaan sampah cerdas di industri tekstil	Persamaan: Mengidentifikasi hambatan implementasi sistem pengelolaan sampah. Perbedaan: Sektor industri vs pemerintah daerah, smart systems vs implementasi regulasi tradisional
13	Puspitawati, D. (2025) "Regulatory and Institutional Approach in Tackling Marine Plastic Pollution: The Practice of Indonesia"	Kualitatif	Menganalisis pendekatan regulasi dan institusional dalam mengatasi polusi plastik laut di Indonesia	Persamaan: Mengkaji pendekatan regulasi dan institusional di Indonesia. Perbedaan: Fokus marine plastic pollution vs pengelolaan sampah darat, skala nasional vs lokal
14	Zainal (2025) "Government policies to reduce palm oil waste pollution in Indonesia: An evaluation of	Evaluasi Kebijakan	Mengevaluasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengurangi polusi limbah kelapa sawit dari	Persamaan: Evaluasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan limbah di Indonesia. Perbedaan: Fokus limbah industri

No	Nama Penulis / Judul / Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan (Persamaan & Perbedaan)
	environmental and socio-economic sustainability"		perspektif sustainability	kelapa sawit vs sampah municipal, evaluasi sustainability vs implementasi
15	Padmapriya, S.S. (2025) "Strategic Policy Recommendations and Implications for Effective Management in Organizational and Regulatory Frameworks"	Kualitatif	Mengembangkan rekomendasi kebijakan strategis untuk manajemen efektif dalam kerangka organisasi dan regulasi	Persamaan: Mengkaji kerangka regulasi untuk manajemen efektif. Perbedaan: Fokus rekomendasi strategis umum vs implementasi perda spesifik

Analisis Sintesis dan Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan analisis komparatif terhadap 15 penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi beberapa pola dan kesenjangan yang menunjukkan kontribusi unik dari penelitian ini:

- a. Kesenjangan Geografis dan Kontekstual: Mayoritas penelitian terdahulu dilakukan di konteks internasional (India, Afrika, Chile, Australia, Turki) atau dalam skala nasional Indonesia. Penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/daerah di Indonesia masih terbatas, khususnya untuk kasus Kabupaten Ciamis.

- b. Kesenjangan Metodologis: Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan literature review, survey persepsi, atau evaluasi outcome kebijakan. Penelitian yang secara mendalam menganalisis proses implementasi kebijakan menggunakan model implementasi yang sistematis (seperti Van Meter & Van Horn) masih terbatas dalam literatur pengelolaan sampah.
- c. Kesenjangan Fokus Analitis: Penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek teknis pengelolaan sampah (teknologi, ekonomi sirkular, smart systems) atau evaluasi dampak lingkungan. Analisis yang mendalam tentang dinamika implementasi kebijakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor institusional, organisasional, dan kontekstual masih relatif jarang.
- d. Kesenjangan Temporal: Meskipun penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2025, namun fokus implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 di Ciamis memberikan perspektif unik tentang evaluasi implementasi setelah periode yang cukup untuk melihat outcome dan dampak kebijakan.
- e. Kontribusi Penelitian Ini: Penelitian ini berkontribusi mengisi kesenjangan-kesenjangan tersebut melalui beberapa aspek kebaruan:
 - a) Kebaruan Kontekstual: Memberikan analisis mendalam tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di konteks spesifik Kabupaten Ciamis, yang dapat memberikan insights tentang tantangan dan peluang implementasi di daerah dengan karakteristik serupa.

- b) Kebaruan Metodologis: Mengaplikasikan Model Van Meter & Van Horn secara sistematis untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah, yang memberikan kerangka analitis yang komprehensif dan terintegrasi.
- c) Kebaruan Teoretis: Mengintegrasikan teori implementasi kebijakan dengan konteks pengelolaan lingkungan di tingkat daerah, yang dapat memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan lingkungan di Indonesia.
- d) Kebaruan Praktis: Memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk peningkatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah yang dapat direplikasi di daerah lain dengan konteks serupa.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi gap dalam literatur akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis untuk peningkatan kualitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat pemerintah daerah di Indonesia.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan sintesis komprehensif antara fenomena empiris implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dengan landasan teoretis Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Kerangka ini menggambarkan alur logis dari identifikasi fenomena implementasi menuju analisis sistematis menggunakan perspektif teoretis yang telah teruji, kemudian

mengoperasionisasikan variabel-variabel teoritis tersebut ke dalam konteks empiris spesifik Kabupaten Ciamis.

Fenomena yang menjadi titik tolak penelitian ini adalah realitas implementasi Perda No. 2 Tahun 2018 yang telah berjalan selama beberapa tahun namun belum dievaluasi secara komprehensif dari perspektif implementasi kebijakan. Sebagai kebijakan daerah yang strategis dalam menangani permasalahan lingkungan, implementasi perda ini melibatkan multiple stakeholder, membutuhkan koordinasi antar lembaga, dan beroperasi dalam konteks keterbatasan sumber daya yang karakteristik pemerintah daerah. Kompleksitas implementasi ini membutuhkan kerangka analitis yang mampu menjelaskan dinamika interaksi antar berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Model Van Meter dan Van Horn dipilih sebagai kerangka teoretis utama karena relevansinya dengan karakteristik implementasi kebijakan daerah yang bersifat multi-variabel dan interaktif. Model ini menyediakan framework sistematis untuk menganalisis enam variabel kunci yang mempengaruhi implementasi: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial-ekonomi-politik, dan disposisi pelaksana. Setiap variabel dalam model ini dapat dioperasionisasikan dalam konteks spesifik implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Ciamis.

Standar dan tujuan kebijakan dalam konteks penelitian ini merujuk pada kejelasan dan konsistensi arah kebijakan yang ditetapkan dalam Perda No. 2 Tahun 2018, termasuk spesifisitas target yang ingin dicapai, kejelasan prosedur implementasi, dan konsistensi antara tujuan jangka pendek dengan visi jangka

panjang pengelolaan sampah di Ciamis. Analisis variabel ini akan mengkaji sejauh mana perda memberikan panduan yang memadai bagi implementor untuk mentranslasikan kebijakan menjadi tindakan konkret.

Sumber daya mencakup analisis kecukupan dan kualitas sumber daya finansial, manusia, teknis, dan infrastruktur yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dalam konteks pemerintah daerah dengan keterbatasan fiskal, analisis ini menjadi kritis untuk memahami sejauh mana keterbatasan sumber daya mempengaruhi kualitas implementasi dan pencapaian tujuan kebijakan.

Karakteristik badan pelaksana mengacu pada kapasitas organisasi, struktur kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya organisasi dari institusi-institusi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Ciamis. Analisis ini akan mengkaji kesiapan institusional untuk menjalankan mandat yang diberikan oleh perda dan kemampuan adaptasi organisasi terhadap tuntutan implementasi.

Komunikasi antarorganisasi mencakup analisis kualitas koordinasi, pertukaran informasi, dan sinkronisasi aktivitas antar berbagai lembaga yang terlibat dalam implementasi, termasuk dinas lingkungan hidup, dinas kebersihan, kecamatan, kelurahan, dan organisasi masyarakat. Efektivitas komunikasi ini sangat menentukan koherensi implementasi dan minimisasi konflik atau duplikasi dalam pelaksanaan.

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik merujuk pada faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi implementasi, termasuk tingkat kesadaran masyarakat,

kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi partisipasi, dinamika politik lokal yang mendukung atau menghambat implementasi, serta karakteristik geografis dan demografis Ciamis yang mempengaruhi strategi implementasi.

Disposisi pelaksana menganalisis sikap, persepsi, komitmen, dan motivasi dari para implementor di berbagai tingkat, mulai dari pimpinan dinas hingga petugas lapangan. Variabel ini kritis karena implementasi yang efektif sangat bergantung pada komitmen dan kemampuan individu-individu yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan di lapangan.

Interaksi antar variabel-variabel tersebut membentuk dinamika implementasi yang kompleks, di mana kekuatan atau kelemahan pada satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya dan secara kumulatif menentukan hasil implementasi. Kerangka pemikiran ini mengakui bahwa implementasi bukan proses linier sederhana, melainkan sistem yang kompleks dengan multiple feedback loops dan interdependencies.

Hasil implementasi dalam kerangka pemikiran ini dikonseptualisasikan dalam bentuk output langsung berupa layanan dan program yang dilaksanakan, outcome berupa perubahan perilaku dan kondisi menengah, serta dampak jangka panjang berupa perbaikan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran keberhasilan implementasi menggunakan indikator multidimensional yang mencakup efektivitas, efisiensi, responsibilitas, partisipasi, dan adaptabilitas.

Kerangka pemikiran ini juga mengintegrasikan perspektif bounded rationality yang mengakui bahwa implementor beroperasi dalam kondisi informasi terbatas, kapasitas kognitif yang terbatas, dan lingkungan yang tidak pasti. Perspektif ini

penting untuk memahami mengapa implementasi seringkali berbeda dari desain awal kebijakan dan mengapa diperlukan fleksibilitas dan adaptasi dalam proses implementasi.

Konteks lokal Kabupaten Ciamis memberikan setting spesifik yang mempengaruhi semua aspek implementasi, mulai dari karakteristik geografis yang mempengaruhi strategi pengumpulan sampah, kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang mempengaruhi partisipasi, hingga kapasitas institusional pemerintah daerah yang mempengaruhi kualitas implementasi. Pemahaman mendalam tentang konteks lokal ini essential untuk menghasilkan analisis implementasi yang akurat dan rekomendasi yang praktis.

Kerangka pemikiran ini berorientasi pada pengembangan rekomendasi untuk peningkatan implementasi yang berbasis pada temuan analisis. Rekomendasi ini akan fokus pada aspek-aspek yang dapat diintervensionalkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi, dengan mempertimbangkan realitas kapasitas dan keterbatasan yang ada di tingkat pemerintah daerah.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menyediakan roadmap yang sistematis dan komprehensif untuk menganalisis implementasi Perda No. 2 Tahun 2018, dari perspektif teoritis yang solid hingga aplikasi praktis yang relevan dengan konteks spesifik Kabupaten Ciamis.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

